

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan dibidang kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional, pemerintah sebagai institusi tertinggi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan harus pula memenuhi kewajiban dalam penyediaan sarana pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan kebutuhan manusia yang utama dan menjadi prioritas yang mendasar bagi kehidupan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kesehatan melibatkan seluruh warga masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dimengerti karena pembangunan kesehatan mempunyai hubungan yang dinamis dengan sektor lainnya.

Pada dasarnya pemerintah dalam hal ini departemen yang tugas pokoknya menangani masalah kesehatan dan departemen-departemen lainnya yang ada hubungannya dengan upaya peningkatan derajat kesehatan mempunyai fungsi perumusan kebijakan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap upaya kesehatan dan upaya lainnya yang berkaitan. Sebaliknya perangkat organisasi di tiap daerah, baik yang merupakan perangkat pusat maupun daerah, mempunyai tugas pokok dan fungsi penyenggaraan kegiatan sesuai dengan petunjuk fungsional dari departemen yang bersangkutan.

Sejak tahun 2008 Pemerintah Pusat telah melaksanakan program jamkesmas untuk masyarakat miskin diseluruh Indonesia dimana kouta untuk Provinsi Gorontalo

sebesar 431.299 jiwa (41,5 %), yang melebihi masyarakat miskin yang ada di Provinsi Gorontalo berdasarkan data BPS 2011 (18,75 %) yang akan dibagi kabupaten /kota. Dalam pelaksanaannya kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo yang justru tidak memiliki jaminan kesehatan apapun sehingga mereka mengalami kesulitan biaya ketika jatuh sakit. Fakta ini sehingga lahirlah program jaminan kesehatan gratis yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga bias mencapai Universal Coverage (UC) pada tahun 2014 nanti. Namun pada tahap awal ini diprioritaskan bagi masyarakat miskin non kota (masyarakat miskin yang belum tercover dengan jaminan kesehatan apapun) sebesar 81.000 jiwa pada tahun 2012.

Kesehatan merupakan hak fundamental bagi setiap warga. Sebagaimana telah ditetapkan oleh Konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 yang mengatakan bahwa setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatan serta negara bertanggung jawab mengatur agar masyarakat terpenuhi hak hidup sehat termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Pembentukan program Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA) dilatarbelakangi oleh berbagai faktor dalam masyarakat miskin lain yang tidak termasuk dalam kuota Jamkesmas, hal ini diatur dalam UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, dan menjadikannya lebih efisien, efektif serta terjangkau oleh masyarakat. Sistem Jaminan

Kesehatan Daerah ini dilakukan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan derajat kesehatan seluruh masyarakat dan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dengan mengutamakan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial, menetapkan bahwa setiap orang berhak atas Jaminan Sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo nomor 6 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahkan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6). Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Semesta Provinsi Gorontalo.

Untuk meningkatkan akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan terhadap peserta jamkesda guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Jaminan kesehatan semesta (jamkesda) adalah masyarakat gorontalo yang mempunyai kartu jamkesda.

Program jaminan kesehatan semesta yang selanjutnya disingkat JAMKESDA adalah upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat yang dilakukan fasilitasi pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas beserta jaringannya dan pelayanan kesehatan rujukan pada kelas 3 rumah sakit pemerintah daerah yang tidak di pungut biaya.

Pemberian jaminan pembiayaan kesehatan kepada peserta secara pra upaya melalui dana APBD pemerintah provinsi dan dana APBD pemerintah kabupaten/kota.meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat gorontalo, meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat gorontalo, membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat di wilayah Provinsi Gorontalo yang mandiri untuk hidup sehat. Tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh masyarakat di provinsi gorontalo.

Rumah Sakit Islam Gorontalo merupakan sebuah unit bisnis yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan. Rumah sakit ini mempunyai 52 karyawan. Fasilitas pelayanan yang disediakan meliputi Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 jam, Rawat Jalan, Rawat Inap, Poli Umum, Poli Gigi, Praktek Dokter Spesialis, Laboratorium Klinik, Radiologi, Rekam Jantung, Apotik Ruang Bedah,Ruang Persalinan, dan Ambulans. Jumlah petugas di Rumah sakit Islam terdiri dari dokter umum 6 orang, dokter spesialis 16 orang, perawat 32 orang, petugas radiologi 2 orang, petugas laboratorium 1 orang. Jumlah tempat tidur terdiri dari kelas I 10 tempat tidur, kelas II 5 tempat tidur, kelas III Pria 8 tempat tidur, kelas III Wanita 8 tempat tidur dan VIP 14 tempat tidur.

Jumlah kunjungan pasien rawat inap pada periode Januari-september tahun 2010 terdapat 2252 kunjungan pasien. Untuk kunjungan pasien rawat jalan terdapat 732 kunjungan pasien.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, penulis menemukan permasalahan, terutama menyangkut Jaminan Kesehatan Semesta dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Islam kepada pasiennya. Hal ini peneliti ingin meneliti tentang Jamkesta, karena di rumah sakit islam masih terdapat bahwa pasien belum memuaskannya program kesehatan yang diberikan baik di kelas 1 dan kelas 2 tentang Jaminan Kesehatan semesta maupun pelayanan lainnya seperti pelayanan medik, pelayanan obat-obatan dan pelayanan administrasi.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melihat bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap program Jamkesta yang ada di Rumah Sakit Islam. Judul penelitian ini ***“Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Program Jamkesta”*** (Studi Kasus di Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Seperti apa persepsi pengguna program jamkesta terhadap pelayanan asuransi jamkesta di Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo?
- b. Bagaimanakah meningkatkan program jamkesta?
- c. Faktor-faktor apakah yang mendorong masyarakat dalam memilih Jamkesta sebagai pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka masalah penelitian yaitu “Bagaimanakah pengaruh pengetahuan masyarakat tentang program jamkesta terhadap kualitas pelayanan kesehatan program jamkesta di rumah sakit islam kota gorontalo”.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui sejauh mana persepsi masyarakat terhadap program jamkesta di Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo.

- a. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap program Jamkesta.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan masyarakat tentang program jamkesta terhadap program Jamkesta.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan akan diperoleh informasi yang dapat bermanfaat antara lain:

- a. Sebagai bahan masukan atau perbandingan bagi pihak yang ada di rumah sakit Kota Gorontalo.
- b. Sebagai hasil karya dalam menambah wawasan pengetahuan yang dapat lebih memperluas pola pikir pembaca khususnya yang berkaitan dengan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo